



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. R. M. Nur Atmadibrata No. 1.A Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 669352 Fax (0741) 669352 Website : www.litbang.jambiprov.go.id
Email : balitbangdajambi.1@gmail.com / balitbangdajambiup@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : **23/KEP/BALITBANGDA-1.2/III/2019**

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA PROVINSI JAMBI NOMOR 02/KEP/BALITBANGDA-1.2/I/2019, TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BALITBANGDA PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi keuangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, perlu dilakukan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- b. bahwa penunjukan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balitbangda Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Balitbangda Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 60)
18. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 718/KEP.GUB/BPBMD-1.2/2018, tanggal 14 Agustus 2018 tentang standar biaya umum Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
19. Keputusan Gubernur Jambi No.1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan Lembaga Teknis, RSUD, Raden Mataherndan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2019

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor : S- 688/BKD-3.2/II/2019, tanggal 19 Februari 2019 tentang Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 dalam jabatan pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, mempunyai tugas ;
- a. Membantu PPTK dalam melaksanakan pengendalian.
 - b. Membantu PPTK dalam menyimpan/menyiapkan dokumen-dokumen untuk pengajuan pembayaran dan menyelenggarakan kartu kendali rincian obyek belanja per kegiatan.
 - c. Membantu PPTK dalam membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini dalam pengelolaan keuangannya berkewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Kepada PPTK dan staf PPTK diberikan honorarium setiap bulan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai Tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 5 Maret 2019



KEPALA/BADAN

Ir. AZRIN.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.196602241992031002

Tembusan :

1. Gubernur Jambi di Jambi (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi
3. Kepala BAKEUDA Provinsi Jambi di Jambi
4. Kepala Biro Adm. Pembangunan & Kerjasama Setda Prov. Jambi
5. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR : 23/KEP/BALITBANGDA-1.2/III/2019
TANGGAL : 5 MARET 2019**

No	Nama / NIP	Jabatan dalam SK	Jumlah Honor/Bulan
1	2	3	4
	<u>BID. PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN</u>		
1.	MUHAMMAD FAUZI, SH NIP.19670804 199403 1 010	PPTK Penelitian dan Pengembangan Sub. Bidang data dan Pengkajian Peraturan	Rp.267.000,-
	ABDUL RONI NIP.19621114 198101 1 001	Staf PPTK	Rp.191.000,-
	SARTIAH, SE, MM. Nip. 19740128 199803 2 002	Staf PPTK	Rp. 191.000,-
2.	A.LUFIEQ.SSTP,M,Si NIP.198911162012061003	PPTK Penelitian Sub. Bidang Pemerintahan Desa	Rp.267.000,-
	Rd. ELVIS NIP.19610528 198503 1 006	Staf PPTK	Rp.191.000,-
	INDAH PURWANTI NIP.197010031992032004	Staf PPTK	Rp.191.000
3.	JONI MARTIN, SH.MH NIP.198301142010011016	PPTK Penelitian Sub. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.267.000,-
	Ir. ABDURAHMAN SIREGAR NIP.19630605 199403 1 005	Staf PPTK	Rp.191.000,-
	SUGIANTO NIP.19641013 199403 1 004	Staf PPTK	Rp.191.000,-
	<u>BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN</u>		
4.	ARNI DIANA, SE NIP.19740118 200003 2 003	PPTK Penelitian dan Pengembangan Sub. Bidang Ekonomi	Rp.267.000,-
	JUFRI, ST. NIP. 19740829 200312 1 004	Staf PPTK	Rp.191.000,-
5	SARTIK, S.Pt, M.Si NIP.19751006 200003 2 002	PPTK Sumber Daya Genetik .	Rp.267.000,-
	RAMAYANTI,S.IP NIP.19780214 200112 1 001	Staf PPTK	Rp.191.000,-
6.	SUARMAN, SE, MAP NIP.19621114 198101 1 001	PPTK 1. Penelitian Sub. Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana 2. Penelitian Analisis Kebijakan Antisipatif dan Responsif	Rp.267.000,-
	MARTIA EKAWATI, SE. NIP. 19860315 200604 2 003	Staf PPTK	Rp.191.000,-
7.	<u>BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN</u>		
	AHMAD YANI, S.Pdi NIP.196310271983031003	1. Penelitan Sub. Bidang Sosial dan Budaya 2. Penelitian Mandiri	Rp.267.000,-
	ADRITAMARYANI NIP.196802212008012001	Staf PPTK	Rp.191.000
8.	ELPINA YULIZA.SE NIP.196307111986032003	PPTK Penelitian Sub. Bidang Kependudukan	Rp.267.000,-
			Rp.191.000,-

9.	Rr. DWI BETHARIA ENDAHAYU, SE NIP.19820120 200903 2 003 MASYHUDI, S.Th.I NIP.197811272011011002 MARNO NIP.19630504 198603 1 011	PPTK Penelitian Sub. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Staf PPTK Staf PPTK	Rp. 267.000,- Rp.191.000,- Rp.191.000,-
	<u>BIDANG INOVASI & TEKNOLOGI</u>		
10	Dr. NOVITA ERLINDA NIP.197111151992032003 CIK NORA NIP. 19641231 198503 2 035 SRI SUGATI, SE NIP.19620318 198201 2 002	1. PPTK Science Park di Provinsi Jambi 2. PPTK Penelitian dan Pengembangan Sub. Bid. Inovasi dan Pengembangan teknologi Staf PPTK Staf PPTK	Rp. 267.000,- Rp.191.000,- Rp.191.000,-
11.	ROMZIAH,SP NIP.19740107 200012 2 005 DARMAYENI NIP.19740915 199602 2 001	PPTK Penguatan dan Pengembangan Sistim Inovasi Daerah (SIDA) Staf PPTK	Rp.267.000,- Rp.191.000,-
12	DESMALINAR, SE NIP.19691204 199303 2 004 S. ARITONANG,SE NIP.196310101994031010 NGATIMIN NIP.19720715 200901 1 007	PPTK Pengembangan Kelembagaan Sentra Promosi dan Pemasaran IPTEK. Staf PPTK Staf PPTK	Rp.267.000,- Rp.191.000,- Rp.191.000,-
	<u>SEKRETARIAT</u>		
13	MIFTAHUL HUDA, SH NIP.19690808 199103 1 005 SUMIYATI ANGGRAINI NIP.196308231983022001 IIN KURNIAWATI, SP,ME NIP.197704272007012004	PPTK : 1. Monitoring Evaluasi dan pelaporan hasil-hasil kerja litbang 2. Rakor dan Forum Kelitbangan 3. Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi 4. Penguatan Jaringan Penelitian (Jarlit)di Provinsi Jambi 5. Penerbitan Jurnal Litbang Staf PPTK Staf PPTK	Rp.267.000,- Rp.191.000,- Rp.191.000,-
14.	SARYANTO,SE NIP. 19692401 199009 1 001	PPTK ; 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Kom, Sumber Daya Air & Listrik 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6) Penyediaan Komponen. Inst. Listrik/Pen. Bangunan Ktr 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan 8) Penyediaan Makanan dan Minuman 9) Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 10) Pengadaan Meubeler 11) Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 12) Pendidikan dan Pelatihan Formal 13) Peningkatan Kompetensi Peneliti	Rp.311.000,-

	R. ERNA LISSA, SP. NIP. 19670728 199002 2 002	Staf PPTK	Rp.222.000,-
15	TUMIJO, SE NIP.197009141995031004	PPTK : 1.Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 3.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional 4.Pemeliharaan Rutin/Brkl Peralatan Gedung Kantor 5.Pemeliharaan Rutin/Brkl Peralatan Listrik & Elektronik 6.Penyusunan laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Realisasi Kinerja Keuangan	Rp. 311.000,-
	ANDRI FARIKO, SE, MM. NIP. 19801231 201101 1 003	Staf PPTK	Rp.222.000,-



KEPALA BADAN,

Ir. AZRIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19660224 199203 1 002